

ANALISIS PERUBAHAN KINERJA DAN STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN SIDOARJO SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA SEMBURAN LUMPUR LAPINDO

Sutikno

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : Jl. Bromo V/20, Malang
Telpon : 0341-558925, Hp: 08123203044 , E-mail: thic_ino@yahoo.com

ABSTRACT

The aims of their study are identify patterns of growth and structural change in the economic sector and to analyze the performance of economic sectors and social-economic impact of the “Lumpur Lapindo” on the area in Sidoarjo.

Analyze to identify patterns of growth and contribution to economic sectors and the performance of economic sectors, thus are: Location Qoution, Ratio Analysis of Growth Models, and Analysis Overlay.

Based on the results anlyze economic structure shows that from 2003 until 2007 the role of primary sector average of 5.57%, the secondary sector (53.72%), tertiary sector (40.71%). Affected areas of greatest economic impact is affected districts since the beginning of “Lumpur Lapindo” which Porong district, Tanggulangin, and Jabon. Based on the results of base analysis, the potential and performance the economic sector before and during the “Lumpur Lapindo” occurred, indicating that the amount of the basic sector and the potential sectors in the District of Porong, Tanggulangin, and Jabon decreased in the event of “Lumpur Lapindo”.

Based on the results of analysis of social-economic losses from the Lapindo mudflow, the following results are obtained. Lapindo mudflow incident has caused damage to property in the area around the blast center. Damaged assets consist of: 1) Land and buildings housing residents; 2) productive plants such as rice, sugarcane, and pulses; 3) Buildings and equipment; 4) infrastructure such as toll roads, electricity networks, irrigation networks, water network, telecommunications networks, gas pipelines, with total losses estimated at Rp 33.27 trillion

PENDAHULUAN

Sejak Juni 2006, upaya penanganan semburan lumpur yang semakin hari semakin membawa dampak merusak mulai dilakukan. Manajemen penanganan lumpur yang difokuskan pada penanggulangan, berhadapan dengan berbagai kendala. Mulai meningkatnya volume semburan yang turun naik, gejolak sosial, rusaknya prasarana transportasi hingga hancurnya ekosistem. Setahun ini, tetap tidak ada kepastian keberhasilan penanganan.

Lumpur Lapindo, yang menyebabkan rusaknya infrastruktur khususnya jalan di Sidoarjo, telah membuat perekonomian di Jawa Timur turun sekitar 1,3 persen, bahkan apabila kondisi ini tidak cepat diantisipasi akan mengancam perekonomian tidak hanya di Jawa Timur, tetapi hingga taraf

nasional. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Jawa Timur meminta Tim Nasional Penanggulangan Lumpur segera mengamankan rel kereta dan jalan raya Porong dan menjamin akses transportasi tersebut aman untuk dilalui. Hal ini diungkapkan Imam Utomo 2 ketika meninjau langsung luapan lumpur yang menenggelamkan rel dan jalan raya Porong di Desa Siring, Porong, Sidoarjo.

Akibat tertutupnya akses jalan raya Porong dan rel kereta oleh lumpur Lapindo Brantas, kerugian ekonomi di Jawa Timur sangat besar. Sebab, jalan raya Porong merupakan satu-satunya jalur penghubung Surabaya-Malang dan Banyuwangi. Jika jalan raya dan rel tergenang lumpur dan tidak bisa dilalui, gubernur khawatir kerugian ekonomi bagi Jawa Timur akan semakin besar dan akan menimbulkan gejolak sosial yang lain.

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya penelitian ini tergolong pada penelitian terapan atau sering disebut applied research. Menurut Mudrajad (2003) applied research, merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini melakukan pengamatan pada pola pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Sidoarjo. Adapun kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Sidoarjo terdiri dari kecamatan: Sidoarjo, Buduran, Candi, 5

Porong, Krembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Bolongbendo, Wonoayu, Tarik, Prambon, Taman, Waru, Gedangan, Sedati, dan Sukodono.

Jenis Data

Penelitian ini mengandalkan pada jenis data sekunder atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Adapaun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah;

data PDRB kabupaten Sidoarjo, PDRB semua kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Sidoarjo, jumlah penduduk kabupaten Sidoarjo, dan pendapatan per kapita.

Alat Analisis

Studi ini menggunakan beberapa metode analisis dalam menjawab tujuan yang akan dicapai. Alat analisis tersebut meliputi: Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Analisis Model Overlay.

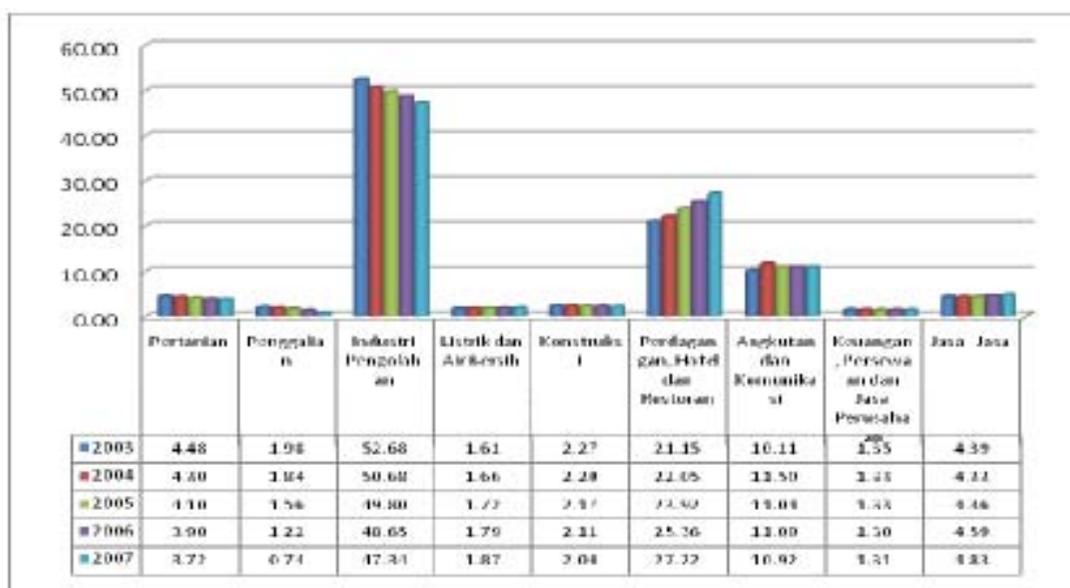
HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Ekonomi

Struktur Ekonomi Kabupaten

Indikator hasil pembangunan ekonomi selain dilihat dari besarnya jumlah PDRB, perlu juga dilihat dari distribusi sektornya. kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo juga bisa dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dan kelompok sektor ekonomi terhadap total PDRB. Berikut ini gambaran kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir.

Gambar 1. Pertumbuhan Kontribusi Masing-Masing Sektor Ekonomi Kabupaten Sidoarjo (2003 - 2007)

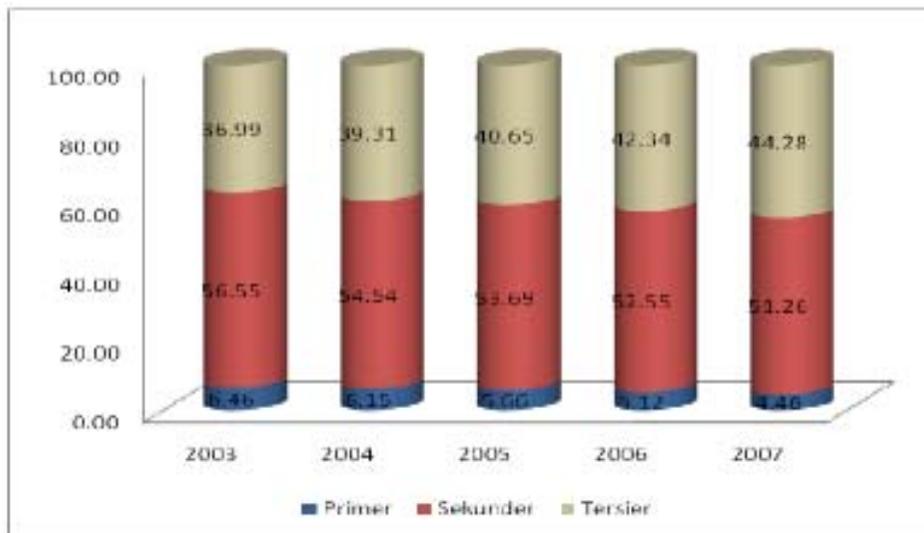


Sumber: Sidoarjo dalam Angka 2008 (diolah)

Kontribusi sektoral tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bagaimana struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Peran sektor di atas dikelompokkan menjadi 3 sektor pokok, yaitu sektor primer, sekunder dan tertier. Kelompok Sektor primer mencakup sektor pertanian, sektor

pertambangan dan Galian. Peranan kelompok sektor primer memberikan kontribusi paling rendah yaitu rata-rata hanya memberikan kontribusi sebesar 5,57%, peran sektor ini didominasi sektor pertanian yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,10%.

Gambar 2. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Sidoarjo (2003 - 2007)



Secara keseluruhan dari tahun 2003 sampai tahun 2007 peran rata-rata sektor primer sebesar 5,57%, sektor sekunder 53,72% dan sektor tertier 40,71%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh sektor Sekunder. 1.2. Struktur Ekonomi Kecamatan

Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 Kecamatan yang tentunya masing-masing kecamatan memiliki perbedaan sektor-sektor ekonomi yang mendominasi kecamatan tersebut. Berikut ini struktur ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. Kontribusi PDRB Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kelompok Sektor Tahun 2005 dan 2007 (Persentase)

No	Kecamatan	2005			2007		
		Primer	Sekunder	Tertier	Primer	Sekunder	Tertier
1	Tarik	5.26	88.55	6.19	4.81	88.87	6.32
2	Prambon	15.76	57.61	26.63	15.50	56.06	28.45
3	Kremlung	27.11	61.09	11.80	17.29	68.61	14.10
4	Porong	34.32	44.52	21.15	37.50	26.70	35.80
5	Jabon	35.55	56.05	8.41	38.33	51.52	10.15
6	Tanggulangin	8.92	79.19	11.89	8.56	75.64	15.80
7	Candi	4.72	81.67	13.62	4.22	81.90	13.88
8	Tulangan	10.15	67.86	21.99	9.42	66.66	23.92
9	Wonoayu	12.96	63.30	23.75	11.97	62.99	25.04
10	Sukodono	9.95	62.24	27.81	8.67	61.97	29.36
11	Sidoarjo	2.51	33.87	63.61	2.19	32.20	65.61
12	Buduran	9.63	74.30	16.07	9.05	73.75	17.20
13	Sedati	6.21	13.46	80.32	5.94	13.67	80.39
14	Waru	0.31	58.70	40.99	0.25	54.32	45.43
15	Gedangan	0.92	88.41	10.67	0.76	87.77	11.47
16	Taman	0.83	52.55	46.62	0.66	48.86	50.48
17	Krian	2.47	58.41	39.12	2.09	55.34	42.57
18	Balombangendo	17.96	57.79	24.25	17.08	56.83	26.09

Sumber: PDRB Kabupaten dan Kecamatan, 2007 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo didominasi Sektor Sekunder yaitu sebanyak 16 kecamatan pada tahun 2005. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Tarik, Prambon, Krembung, Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Buduran, Waru, Gedangan Taman, Krian, dan Balongbendo.

Untuk 2 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Sedati didominasi oleh Sektor Tertier.

Pada tahun 2005 dan 2007 kecamatan-kecamatan tersebut tetap didominasi oleh Sektor Tertier dengan angka tertinggi pada kecamatan Sidoarjo yaitu sebesar 2.293.416.552 (Ribuan Rupiah) pada tahun 2005 dan 2.822.363.410 (Ribuan Rupiah) pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kecamatan Sidoarjo dan Sedati didominasi oleh Sektor Tertier. Adapun perkembangan PDRB Kecamatan yang terkena semburan lumpur lapindo adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Perkembangan PDRB Kecamatan yang Terkena Semburan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kelompok Sektor Tahun 2005 dan 2007 (Ribuan)

No	Kecamatan	2005 (Sebelum)			2007 (Sesudah)		
		Primer	Sekunder	Tertier	Primer	Sekunder	Tertier
1	Krembung	121,698,057	274,193,495	52,965,952	75,349,142	299,035,656	61,433,847
2	Porong	218,972,871	284,023,314	134,948,894	129,519,509	92,224,081	123,639,119
3	Jabon	129,864,360	204,758,405	30,714,832	124,791,840	167,741,138	33,029,822
4	Tanggulangin	65,864,970	584,902,704	87,846,406	50,129,753	442,998,159	92,516,147
5	Candi	46,864,917	811,317,251	135,275,708	46,302,552	897,720,033	152,148,050
6	Tulangan	34,652,770	231,561,947	75,023,800	35,029,279	247,972,743	88,969,501

Sumber: PDRB Kabupaten dan Kecamatan, 2007 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terjadinya penurunan PDRB di kecamatan yang terkena semburan lumpur lapindo, khususnya yang sudah terkena sejak awal yaitu Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Sedangkan untuk Krembung, Candi dan Tulangan merupakan daerah yang baru saja masuk dalam wilayah semburan lumpur lapindo.

Analisis Sektor Unggulan

Penentuan sektor unggulan masing-masing kecamatan tersebut didasarkan pada Sektor Basis dan Sektor Potensi. Sektor Basis merupakan sektor yang secara relatif mempunyai kontribusi melebihi rata-rata dibanding sektor lainnya. Sedangkan Sektor Potensi adalah sektor yang secara relative mempunyai pertumbuhan melebihi rata-rata dibanding sektor lainnya.

Sektor Basis

Sebelum terjadi lumpur lapindo, kecamatan yang mempunyai sektor basis paling banyak adalah

Kecamatan Prambon, Tanggulangin, Candi, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Taman, Krian, serta Balongbendo mempunyai 5 sektor Basis. Sedangkan kecamatan yang

paling banyak mempunyai sub sektor basis adalah Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 14 sub sektor Basis.

Setelah terjadi lumpur lapindo, kecamatan yang mempunyai sektor basis paling banyak adalah Kecamatan Prambon, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Krian, serta Balongbendo mempunyai 5 sektor Basis. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor basis adalah Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 14 sub sektor Basis.

Sektor Potensi

Sebelum terjadi lumpur lapindo, kecamatan yang mempunyai sektor potensi paling banyak adalah Kecamatan Sidoarjo mempunyai 7 sektor potensi. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor potensi juga Kecamatan

Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 16 sub sektor potensi.

Setelah terjadi lumpur lapindo, kecamatan yang mempunyai sektor potensi paling banyak adalah Kecamatan Sidoarjo, Taman, dan Krian masing-masing mempunyai 6 sektor Potensi. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor Potensi hanya Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 18 sub sektor Potensi.

Kinerja Sektor Ekonomi

Kombinasi sektor basis dengan sektor potensi bertujuan untuk menentukan sektor dan sub sektor basis dan juga mempunyai tingkat potensi tinggi bila dibandingkan dengan wialayah-wilayah lainnya. Berdasarkan kombinasi di atas, maka sektor dan sub sektor di masing-masing kecamatan dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu.

K1 : Sektor Basis dan Sektor Potensi

K2 : Bukan Sektor Basis, tapi Sektor Potensi

K3 : Sektor Basis, tapi Bukan Sektor Potensi

K4 : Bukan Sektor Basis dan Bukan Sektor Potensi

Sebelum terjadi lumpur lapindo, Kecamatan yang mempunyai sektor klasifikasi K1 paling banyak adalah Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, dan Taman masing-masing mempunyai 3 sektor Klasifikasi K1. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor Klasifikasi K1 hanya Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 12 sub sektor Klasifikasi K1.

Kecamatan yang mempunyai sektor Klasifikasi K1 setelah peristiwa Lumpur Lapindo paling banyak adalah Kecamatan Wonoayu, Buduran, dan Krian mempunyai 4 sektor Klasifikasi K1. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor Klasifikasi K1 hanya Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 12 sub sektor Klasifikasi K1.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Sektor Basis, Sektor Potensi dan Sektor Unggulan Sebelum dan Sesudah Semburan Lumpur Lapindo di Enam Kecamatan

No	Kecamatan	Sebelum		Sesudah	
		Sektor	Sub Sektor	Sektor	Sub Sektor
Sektor Basis					
1	Porong	3	8	3	9
2	Tanggulangun	5	7	5	8
3	Jabon	4	7	4	7
4	Krembung	4	8	4	8
5	Tulangan	5	10	5	10
6	Candi	5	9	4	9
Sektor Potensi					
1	Porong	2	7	1	-
2	Tanggulangun	4	8	1	2
3	Jabon	2	4	1	3
4	Krembung	1	4	1	4
5	Tulangan	2	3	3	6
6	Candi	2	3	2	4
Sektor Unggulan					
1	Porong	-	5	1	-
2	Tanggulangun	2	4	1	1
3	Jabon	1	3	-	2
4	Krembung	1	3	1	2
5	Tulangan	1	2	2	5
6	Candi	1	1	1	2

Sumber: PDRB Kecamatan, 2003-2007 (diolah)

Berdasarkan analisis sektor basis, sektor potensi dan sektor unggulan maka dapat diketahui perubahan akibat terjadinya semburan lumpur lapindo. Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon merupakan daerah yang terlebih dahulu masuk wilayah semburan sehingga terjadi perubahan yang besar. Berbeda dengan 3 kecamatan lainnya yang baru saja masuk dalam wilayah semburan lumpur lapindo, sehingga belum terjadi perubahan yang berarti.

Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana Lumpur Lapindo

Peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo telah menimbulkan kerusakan aset di areal sekitar pusat semburan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan wilayah regional lainnya. Aset yang

rusak terdiri dari: 1) Tanah dan bangunan hunian penduduk; 2) Tanaman produktif seperti tanaman padi, tebu, dan palawija; 3) Bangunan dan peralatan pabrik; 4) Infrastruktur seperti jalan tol, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa gas; Semburan lumpur tersebut secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat dan dunia usaha di wilayah genangan.

Dalam kasus semburan lumpur PT. Lapindo Brantas, perhitungan Greenomics menyebutkan kerugian yang harus diganti bisa mencapai angka Rp 33,27 triliun. Terdiri dari biaya penanganan sosial, pembersihan lumpur, ekologi, dampak pada pertumbuhan ekonomi, pemulihan bisnis dan ekonomi, biaya kehilangan kesempatan (jangka waktu sangat pendek) dan ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi dampak.

Tabel 4. Perhitungan Kerugian Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo

Sumber: Greenomic Indonesia

Kerugian tersebut masih bisa lebih besar, terutama jika terjadi eskalasi dampak turunan lebih luas lagi dalam jangka menengah dan panjang. Besarnya nilai kerugian diakibatkan karena adanya floating time (waktu mengambang atau ketidakpastian) penanganan semburan lumpur tersebut.

Perkiraan Proporsi Biaya Ekonomi

Perkiraan ini diperlukan untuk memberi gambaran tentang pembagian beban yang dipikul oleh Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan masyarakat. Meskipun demikian perlu

disadari bahwa pendistribusian beban biaya ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati karena sulitnya memisahkan secara tegas beban biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Perincian proporsi beban kerugian ekonomi tahun 2006-2015, terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Perkiraan Proporsi Biaya Ekonomi Akibat Semburan Lumpur Lapindo (jutaan Rupiah)

No	Sektor	Konklusif ²⁾		Non-Konklusif ²⁾	
		Nilai	%	Nilai	%
1	Publik/Negara	2.350.000	7,14	2.550.000	7,31
2	BUMN	210.000	0,64	1.010.000	2,89
3	Swasta	970.000	2,95	1.961.000	5,62
4	Masyarakat	29.366.000	89,27	29.372.000	84,18
	Total	32.896.000	100,00	34.893.000	100,00

2) Dibedakan menurut kerugian ekonomi tidak langsung yang sudah jelas (konklusif) dan yang belum jelas (non-konklusif)

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK RI

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa porsi terbesar dari biaya ekonomi akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo menjadi beban masyarakat. Biaya ekonomi yang nyata menjadi beban masyarakat sebesar Rp 29.366.000.000.000 (89,27%). Biaya ekonomi yang potensialnya menjadi beban masyarakat sebesar Rp 29.372.000.000.000 (84,18%).

Kerusakan Infrastruktur

Semburan lumpur lapindo akan menimbulkan kerusakan infrastruktur pada wilayah semburan. Nilai kerusakan aset dan infrastruktur akibat dampak langsung semburan lumpur Sidoarjo sebesar Rp 5.121.634.660.000, yakni:

Tabel 6. Kerusakan Infrastruktur Akibat Semburan Lumpur Lapindo (jutaan Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	%
1	Kerugian Masyarakat	3.200.978,95	62,50
2	Kerugian Usaha Swasta	376.901,30	7,36
3	Pemerintah Pusat	0,00	-
4	BUMN	57.075,80	1,11
5	Pemerintah Propinsi Jatim	0,00	-
6	BUMD Propinsi Jatim	0,00	-
7	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	0,00	-
8	PDAM Kabupaten Sidoarjo	170,91	0,01
9	Kontraktor Pelaksana	1.486.507,70	29,02
	Total	5.121.634.,65	100,00

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK RI

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang menanggung kerugian terbesar secara riil adalah masyarakat sebagai pemilik tanah dan bangunan, yakni sebesar 62,5% dari keseluruhan, selanjutnya adalah kontraktor pelaksana sebesar 29,02, usaha swasta sebesar 7,36%, BUMN sebesar 1,11% dan PDAM Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,01%.

Dampak Terputusnya Jalur Transportasi Darat Jalur Tol Porong

Terputusnya jalur transportasi darat berupa jalur tol Surabaya-Gempol yang merupakan jalur

utama keluar masuknya barang (ekspor-impor) mengharuskan institusi/lembaga yang terkait seperti Organda, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Jawa Timur, dan Administratur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan 12 serangkaian tindakan guna memperlancar arus barang ekspor-impor dari dan Surabaya (Pelabuhan Tanjung Perak).

Sehubungan dengan terganggunya jalur transportasi, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yakni ekspor/impor non migas tidak mengalami penurunan, tetapi menambah biaya yang cukup besar, berdasarkan data Disperindag dan GPEI, yaitu:

Tabel 7. Ekspor/Impor Non Migas Akibat Semburan Lumpur Lapindo

*) data s.d September 2006, pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun 2005
Sumber: Disperindag, (diolah BPK RI)

Dampak Terhadap Armada Bus

Sedangkan berdasarkan menurut data Organda Provinsi Jawa Timur, jumlah pengusaha otobis (PO) yang melayani trayek, yaitu:

- Surabaya – Malang : 21 PO, 400 bus
- Surabaya – Banyuwangi : 15 PO, 500 bus
- Surabaya – Bali : 5 PO, 60 bus,

Jumlah kerugian PO, akibat dari putusnya Tol Gempol – Porong, maka adanya penambahan solar, kehilangan rit dan penurunan penumpang adalah sebesar Rp 629.000,00 per hari.

Berdasarkan klaim kerugian dari PO yang diajukan ke LBI melalui organda selama 25 hari adalah kurang lebih sebesar Rp 12.590,70 juta. Dari klaim tersebut oleh LBI disetujui sebesar Rp 4.460,00 juta dan telah dibayar sebesar Rp 1.036,00 juta dan telah diserahkan ke masing-masing PO sesuai prosentase yang diajukan.

Menurut hasil survei Dinas Perhubungan menyebutkan empat perusahaan otobus di Malang, yaitu PO Tentrem, PO Restu, PO Pelita Mas dan PO Pertiwi, mengurangi jumlah armada. Dengan rincian sebagai berikut (sumber: www.detik.com):

- PO Tentrem sebelum lumpur sebanyak 92 unit, setelah lumpur sebanyak 48 unit setiap harinya, atau turun sebesar 47,83%;
- PO Restu sebelum luapan lumpur sebanyak 200 unit, setelah lumpur sebanyak 95 unit setiap harinya atau turun sebesar 52,50%;
- PO Pelita Mas sebelum luapan lumpur sebanyak 21 unit, setelah lumpur sebanyak 11 unit setiap harinya atau turun sebesar 47,62%;
- PO Pertiwi sebelum luapan lumpur sebanyak 18 unit, setelah lumpur sebanyak 13 unit setiap harinya atau turun sebesar 27,78%. 13

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis data, maka penelitian ini menemukan temuan-temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil analisis struktur ekonomi sebelum dan pada saat terjadi semburan Lumpur Lapindo, baik di wilayah kabupaten maupun masing-masing kecamatan, maka diperoleh temuan sebagai berikut:
 - Sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 peran rata-rata sektor primer sebesar 5,57%, sektor sekunder 53,72% dan sektor tertier 40,71%.
 - Daerah yang terkena dampak ekonomi paling besar adalah kecamatan yang terkena semburan lumpur lapindo sejak awal yaitu kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon, daerah ini mengalami penurunan PDRB. Sedangkan untuk Krembung, Candi dan Tulangan merupakan daerah yang baru saja masuk dalam wilayah semburan lumpur lapindo.
- Berdasarkan hasil analisis sektor basis dan potensi sebelum dan pada saat terjadi semburan Lumpur Lapindo di masing-masing kecamatan, maka diperoleh temuan sebagai berikut:
 - Jumlah sektor basis di Kecamatan Porong, sebelum dan sesudah semburan lumpur lapindo tidak mengalami perubahan, namun untuk sektor potensi mengalami perubahan yaitu sebelumnya 2 sektor dan 7 sub sektor menjadi 1 sektor dan tidak memiliki sub sektor potensi.

- Jumlah sektor basis di Kecamatan Tanggulangin, sebelum dan sesudah semburan lumpur lapindo tidak mengalami perubahan, namun untuk sektor potensi mengalami perubahan yaitu sebelumnya 4 sektor dan 8 sub sektor menjadi 1 sektor dan 2 sub sektor potensi.
 - Jumlah sektor basis di Kecamatan Jabon, sebelum dan sesudah semburan lumpur lapindo tidak mengalami perubahan, namun untuk sektor potensi mengalami perubahan yaitu sebelumnya 2 sektor dan 4 sub sektor menjadi 1 sektor dan 3 sub sektor potensi.
 - Kecamatan Krembung tidak mengalami perubahan Jumlah sektor basis, sektor potensi dan sektor unggulan dikarenakan baru masuk wilayah semburan lumpur lapindo sehingga belum terjadi perubahan yang berarti.
 - Kecamatan Tulangan tidak mengalami perubahan Jumlah sektor basis, sektor potensi dan sektor unggulan dikarenakan baru masuk wilayah semburan lumpur lapindo sehingga belum terjadi perubahan yang berarti. 14
- Berdasarkan hasil analisis kinerja sektor ekonomi sebelum dan pada saat terjadi semburan Lumpur Lapindo di masing-masing kecamatan, maka diperoleh temuan sebagai berikut:
 - Jumlah sektor unggulan di Kecamatan Porong sebelum terjadi Lumpur Lapindo ada 5 sub sektor unggulan, setelah terjadi Lumpur Lapindo menjadi 1 sektor dan tidak memiliki sub sektor unggulan.
 - Jumlah sektor unggulan di Kecamatan Tanggulangin sebelum terjadi Lumpur Lapindo ada 2 sektor dan 4 sub sektor unggulan, setelah terjadi Lumpur Lapindo menjadi 1 sektor dan 1 sub sektor unggulan.
 - Jumlah sektor unggulan di Kecamatan Jabon sebelum terjadi Lumpur Lapindo ada 1 sektor dan 3 sub sektor unggulan, setelah terjadi Lumpur Lapindo menjadi hanya memiliki 2 sub sektor unggulan.
 - Kecamatan Krembung dan Tulangan tidak mengalami perubahan jumlah baik sub sektor maupun sektor unggulan yang dimiliki, walaupun terjadi Lumpur Lapindo.
- Berdasarkan hasil analisis kerugian sosial ekonomi dari semburan Lumpur Lapindo, maka diperoleh temuan sebagai berikut:
 - Peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo telah menimbulkan kerusakan aset di areal sekitar pusat semburan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan wilayah regional lainnya. Aset yang rusak terdiri dari: 1) Tanah dan bangunan hunian penduduk; 2) Tanaman produktif seperti tanaman padi, tebu, dan palawija; 3) Bangunan dan peralatan pabrik; 4) Infrastruktur seperti jalan tol, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa gas, dengan total kerugian ditaksir sebesar Rp 33,27 triliun.
 - Biaya ekonomi langsung di wilayah yang tergenang lumpur pada tahun 2006 sebesar Rp 1.407.936.000.000, dengan rincian sebesar Rp 1.248.939.000.000 berupa hilangnya aset dan Rp 158.997.000.000 berupa hilangnya pendapatan masyarakat secara agregat.
 - Biaya ekonomi langsung untuk tahun 2007-2015 mencapai Rp 18.482.427.000.000, dengan rincian Rp 16.434.731.000.000 merupakan kehilangan aset dan Rp 2.047.696.000.000 kehilangan pendapatan. Untuk total keseluruhan yaitu sebesar Rp. 19.890.364.000.000.
 - Biaya ekonomi tidak langsung selama 2006-2015 mencapai Rp 7.407.440.000.000. Dua komponen terbesar dari biaya ekonomi tersebut adalah penurunan nilai jual aset Rp 4.367.120.000.000 (58,96%) dan penurunan pendapatan petambak Rp 2.744.460.000.000 (37,05%). Sedangkan komponen terkecil adalah penurunan

- pendapatan mini bus Rp 2.220.000.000 (0,03%).
- Bagian terbesar biaya ekonomi dari kegiatan relokasi menjadi beban dari upaya pemulihan pemukiman Rp 2.669.660 juta (47,68%), dan berikutnya adalah untuk pemulihan prasarana publik Rp 2.079.710 juta (37,14%). Sementara itu beban biaya pemulihan usaha hanya Rp 849.790 juta (0,02%).
 - Porsi terbesar dari biaya ekonomi akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo menjadi beban masyarakat. Biaya ekonomi yang nyata menjadi beban masyarakat sebesar Rp 29.366.000.000.000 (89,27%). Biaya ekonomi yang potensialnya menjadi beban masyarakat sebesar Rp 29.372.000.000.000 (84,18%).
 - Semburan lumpur lapindo akan menimbulkan kerusakan infrastruktur pada wilayah semburan. Nilai kerusakan aset dan infrastruktur akibat dampak langsung semburan lumpur Sidoarjo sebesar Rp 5.121.634.660.000.
 - Terputusnya jalur transportasi darat berupa jalur tol Surabaya-Gempol yang merupakan jalur utama keluar masuknya barang (ekspor-impor) mengharuskan institusi/lembaga yang terkait seperti Organda, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Jawa Timur, dan Administratur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
 - Akibat dari putusnya Tol Gempol – Porong, maka jumlah kerugian PO mengalami kerugian dari adanya penambahan solar, kehilangan rit dan penurunan penumpang yaitu sebesar Rp 629.000,00 per hari.

Saran

Dari hasil temuan-temuan di atas ada beberapa implikasi terhadap kebijakan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Dengan adanya perubahan struktur ekonomi, terutama di kecamatan yang terkena dampak langsung lumpur lapindo dari sektor primer

ke tersier (perdagangan), maka dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, para pedagang harus dapat melakukan berbagai inovasi penjualan, seperti penataan barang, kebersihan tempat berjualan, menjual dengan sistem paketan, melakukan investasi lebih dari satu jenis usaha ditempat yang berbeda.

- Pemerintah pusat maupun Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur harus segera menyediakan infrastruktur baru terutama transportasi jalan arteri Porong dan pemukiman bagi masyarakat yang rumahnya terendam lumpur, yang sampai saat masih tinggal di pengungsian.
- Selain penyediaan infrastruktur jalan dan perumahan, pemerintah daerah juga harus segera memindahkan para pedagang pasar lama porong ke pasar baru porong, dimana hal itu sudah menjadi hak para pedagang yang sudah membeli kavling.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, A., Effendi, N., Boediono, 2002, *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, BPFY Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, 1997. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Ketiga)*, Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFY, Yogyakarta
- Brojonegoro, Bambang P.S, 1999. *The Impact of Currnt Economic Crisis to Regional Development Pattern in Indonesia*, Paper, LPEM-FEUI, Jakarta.
- Dick, H., Fox, J. J., & Mackie, J. (Eds.), 1993, *Balanced Development: East Java in the New Order*. Singapore: Oxford University Press
- Haerudin, Andi, 2001, *Identifikasi Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Soppeng 1994/1995-1999/2000*,

- Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM, Tidak dipublikasikan.
- Isard, W. 1956. *Location and Space Economy*. Cambridge: MIT Press.
- Jaya, Iwan, 1993, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LPFE-UI,
- Juoro, U., 1989, *Perkembangan Studi Ekonomi Aglomerasi dan Implikasi Bagi Perkembangan Perkotaan di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 37 No. 2
- Kuncoro M., 2003, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis)*, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro M., 2001, *Analisis Spasial dan Regional (Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia)*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta
- Kuncoro, M., Adji, A., & Pradiptyo, R. (1997). *Ekonomi Industri: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Yogyakarta: Widya Sarana Informatika.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. (1st ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Maulana Yusuf, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Volume XIVII. Nomor 2: 1999
- Perroux., 1950. *Economic Development Culture Change, Growth and Development*. Hafner Publishing Company, New York
- Sjafrizal, 1997, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Prisma, LP3ES, No.3
- Sjoholm, F. 1999. "Productivity Growth in Indonesia: The Role of Regional Characteristics and Direct Investment", *Economic Development and Cultural Change*, 47(3), 559-584
- Soepono, Prasetyo, 1998. *Peranan Daerah Perkotaan Bagi Pembangunan Regional: Penerapan Model Van Thunen yang dimodifikasi di Indonesia*. *Junal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 13 No.2
- Soepono, Prasetyo, 2000. *Model Gravitasi sebagai Alat Pengukur Hinter Land dari Central Place suatu Tinjauan Teoritik*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 15 No. 4
- Soepono, Prasetyo, 1999, *Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah*, *jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.4
- Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan*, LP3ES UI, Jakarta
- Sutarno, 2002, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan PDRB Per Kapita Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, (1993-2000)*, Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM, Tidak dipublikasikan
- Todaro, Michael, P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Erlangga, Jakarta
- Warpani, Suwarjoko, 1984. *Analisis Kota dan Daerah*, Edisi ketiga, ITB Bandung